

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada bab v dengan judul “Peran Pemerintah untuk Mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta dalam Perspektif *Smart City*” dapat di buat kesimpulan yang merujuk pada rumusan masalah, sebagai berikut:

1.1.1 Peran Pemerintah untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta dalam Perspektif *Smart City* berdasarkan indikator Kota Inklusif:

1. Pemerintah menjalankan dan melaksanakan kebijakan Kota Inklusif untuk memberikan ruang kepada 5 kelompok masyarakat yang disebut afirmatif gender agar mereka memiliki kesetaraan dengan masyarakat lain. Pada tahun 2021 empat belas Kecamatan di Kota Yogyakarta diharapkan bisa menjadi Kecamatan percontohan Kota Inklusif. Mewujudkan Kota Inklusif memerlukan bantuan semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan Kota Inklusif. Sejauh ini belum semua masyarakat dan ASN mengerti tentang Kota Inklusif. Kebijakan Kota Inklusif juga membuat banyak perubahan pada fasilitas yang ada di gedung pemerintahan. Gedung pertemuan, toilet dan akses jalan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dari afirmatif gender, walaupun belum semua fasilitas bisa disediakan oleh pemerintah.

2. Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Kota Inklusif cukup baik. Setiap kecamatan memiliki Forum Kecamatan Inklusif sebagai wadah untuk menampung saran dan masukan. Forum ini terdiri dari perwakilan afirmatif gender. Saran dan masukan yang diberikan warga ditampung pihak kecamatan untuk di teruskan pada musrembang tingkat kota, sehingga untuk sebuah masukan yang diberikan warga membutuhkan waktu yang cukup lama. Masukan yang diberikan warga contohnya adalah Pembangunan Rumah Layanan Disabilitas yang membutuhkan waktu dua tahun dann baru akan direalisasikan tahun depan.
3. Pemerintah telah menyediakan aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Aplikasi ini mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan kejadian, komplain dan juga melakukan pengajuan dokumen. Keterbatasan aplikasi ini tidak bisa diakses oleh disabilitas netra. Selain dari segi aplikasi, transportasi juga menjadi alternatif untuk memberikan kemudahan dan membantu masyarakat. Transportasi transjogja sangat membantu warga yang ingin melakukan perjalanan, tetapi tidak semua kalangan dapat mengakses transjogja karena jarak antar halte dan transjogja yang bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan, kemudian akses ram halte yang susah untuk diakses pengguna kursi roda. Akses jalan untuk disabilitas netra juga sangat meresahkan karena *gilding block* yang disediakan masih banyak yang mengarah ke selokan dan tiang jalan.

4. Pemerintah memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki keterampilan yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan pendapatannya, tetapi tidak semua masyarakat bisa mengembangkan keterampilan yang mereka miliki karena tidak adanya modal. Pelatihan keterampilan untuk disabilitas hanya terbatas untuk disabilitas tunarungu dan tuna daksa (fisik ringan). Pelatihan keterampilan tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi pelatihan keterampilan untuk disabilitas lebih banyak diberikan oleh pihak non-pemerintah. Selain pelatihan keterampilan pihak pemerintah juga sedang melakukan Gerakan Gandeng Gendong untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada pemberdayaan kelompok, tetapi dari kelompok kecil dimasyarakat merasa Gerakan ini tidak akan berjalan dengan baik untuk mereka karena mencairan dana dari setiap kegiatan adalah tiga bulan sekali dan itu sangat merugikan untuk kelompok kecil yang tidak memiliki modal besar

5. Hidup berdampingan dengan beragam latar belakang

Yogyakarta merupakan Kota Budaya dan Kota Pendidikan. Banyak orang dengan perbedaan suku agama, ras, dan golongan yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta. Melalui perbedaan ini masyarakat harus bisa hidup secara berdampingan. Para pendatang harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di Kota Yogyakarta. Saling menghormati membuat masyarakat bisa tinggal dengan layak dan nyaman.

1.1.2 *Stakeholder* yang ikut berperan dalam mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta sangat banyak baik pemerintah maupun non-pemerintah. Stakeholder-stakeholder ini bekerjasama untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah yaitu Kota Inklusif, Kota yang setara untuk semua. Kerjasama yang terjalin pada jejaring Kota Inklusif ini belum begitu tinggi. Berdasarkan 4 metrik yang ada di SNA, Dinas Sosial merupakan aktor yang paling berpengaruh karena Dinas Sosial memiliki skor tertinggi pada setiap perhitungan metrik.

Jaringan yang terbentuk belum begitu luas karena setiap stakeholder memiliki pengertian Kota Inklusif yang berbeda membuat stakeholder tidak berjalan secara beriringan. Mengajak organisasi pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi non-pemerintah hanya sekedar formalitas, selanjutnya organisasi non-pemerintah memilih melakukan kegiatannya sendiri dan mewujudkan Kota Inklusif sesuai dengan yang mereka pahami. Penunjukan Kecamatan Percontohan Kota Inklusif juga menjadi permasalahan sendiri ketika kelurahan-kelurahan yang ada di bawah kecamatan tidak bisa mengkoordinasikan mengenai Kota Inklusif. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai Kota Inklusif dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Bukan hanya masyarakat, ASN yang harusnya mengetahui kebijakan Kota Inklusif agar nantinya bisa mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat pun masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti.

1.2 Saran

1. Peran yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta dalam perspektif *Smart City*

Pemerintah harus menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan *stakeholders* lain agar Kota Inklusif ini benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan Afirmatif Gender. Pemerintah juga bisa merespon keinginan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang masukannya tidak di respon oleh pemerintah cenderung menjadi acuh dan malas untuk ikut terlibat lebih jauh. Terlebih lagi Kota Inklusif merupakan program Pemerintah Kota dan Organisasi Perangkat Daerah sudah memiliki kewenangannya masing-masing, masyarakat mengharapkan pemerintah bisa melakukan tugasnya dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat agar menjadi setara dengan yang lain.

2. Jejaring yang terbentuk untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta

Membuat semua berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan memang memerlukan banyak waktu dan usaha. Tantangannya adalah bagaimana membuat pemerintah, LSM, maupun masyarakat turun serta dalam menyukseskan kebijakan Kota Inklusif. Keterlibatan semua pihak membuat kebijakan ini akan terwujud dengan cepat. Pemerintah mempelajari mengenai Kota Inklusif dan harus bekerja keras untuk melakukan sosialisasi

kemudian mengajak semua pihak untuk ikut terlibat menyukseskan kebijakan Kota Inklusif ini.

Masyarakat juga harus menyuarakan pendapatnya, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Program Kota Inklusif ini tidak akan terwujud jika pelaksanaannya hanya dari pemerintah tetapi masyarakat tidak mengetahui tentang Kota Inklusif. Keikutsertaan masyarakat membuat Kota Inklusif ini cepat terwujud, sehingga sangat dibutuhkan masyarakat untuk membantu pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat lainnya tentang program yang sedang dilaksanakan.